



Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Mukhtar Mas'ud^{1*}, Bahtiar¹

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, IAIN Parepare

*Corresponding author email: mukhtarmasud@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received Desember 03, 2024

Approved Desember 29, 2024

Keywords:

Implementation, Al-Qur'an Education, Government Policy

ABSTRACT

The implementation of government policies related to Quranic education in Soreang District, Parepare City, is an important issue that needs to be studied and comprehensively understood. Therefore, research and analysis are necessary to ensure that the implementation process, particularly in terms of teaching and development, is given priority so that the Quranic education policies issued by the government can be successful and effective. Without government policies related to Quranic education, the community members who manage Quranic education programs, such as Quranic Education Parks (Taman Pendidikan Al-Quran), would lack legitimacy. The implementation of government policies include: the first aspect concerns the government policies themselves; the second pertains to Quranic education as the substance of the research; and the third involves the urgency and benefits of Quranic education for the Muslim community in Soreang District, Parepare City. These three aspects will be discussed in this article to be understood and serve as a learning resource, especially for Muslims, particularly children and adolescents, who must understand and possess the ability to read the Quran. The implementation of government policies related to Islamic education outside formal schools should be a concern for all, including parents, community leaders, religious figures, and Muslim children, so that its implementation can meet expectations. If Muslim children and adolescents can read the Quran fluently, then the success of Quranic education in Soreang District, Parepare City, can be categorized as a successful in the community. The success of Quranic education in this district is marked by the ability of teachers (ustads and ustadzahs) to effectively teach their students, evidenced by their ability to read the Quran well. The implications of this research are: first, the government's policy provides ample opportunities for the Muslim community to educate their children in Quranic educational institutions, such as Quranic Education Parks in Soreang District, Parepare City. Second, there is a realization of improved quality in teaching, especially Quranic education, as Quranic education requires qualified teachers. Third, the students (santri) who receive knowledge from these educators will be able to understand and apply it in their worship, religious life, and community involvement.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Mas'ud, M., & Bahtiar. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Kecamatan Soreang Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2887-2897. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3629>

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan Al-Qur'an merupakan sesuatu yang sangat diperlukan mengingat saat ini banyak pengelola pendidikan seperti TPA yang mengharapkan lembaga yang akan dikelolanya memiliki legitimasi. Dengan legitimasi yang dimiliki maka para pengelola lembaga tidak merasa khawatir dengan pelaksanaannya. Untuk diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memikirkan dan memberikan bantuan moril bahkan materil agar implementasinya dilaksanakan sesuai harapan bersama. Hal ini menjadi solusi dalam pengembangan suatu pendidikan dalam suatu daerah untuk tujuan pendidikan Islam terutama kepada para pelajar sekolah dasar dan sederajat. Dalam hal ini perhatian orang tua dan para pendidik di sekolah sangat diperlukan untuk kesuksesan suatu pendidikan bagi anak.

Pemerintah Daerah Kota Parepare, Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan baca tulis Al-Qur'an bertujuan agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al-Qur'an secara baik dan benar (Perwali Parepare, 2015). Merupakan sesuatu yang diharapkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anaknya yang sedang mempelajari huruf Hijaiyyah. Masyarakat yang beragama Islam diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempelajarinya. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atau dasar hubungan timbal-balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan (Maulana, 2020).

Dengan menyimak Peraturan Daerah Kota Parepare tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Parepare dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk mempelajari Al-Qur'an. Peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar seluas-luasnya agar fasih membaca dan menulis. Hal diharapkan untuk belajar terus belajar agar peserta didik memiliki suatu kecerdasan sehingga aspek keagamaannya terbangun sejak dini. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Parepare patut kita apresiasi bersama. Karena semisal Pemerintah Kota Parepare tidak mengizinkan maka warga masyarakat yang mengelola lembaga ini akan mengalami kendala, muncul keraguan dan warga masyarakat yang sebelumnya ingin mengelola suatu lembaga pendidikan keagamaan Islam akan merngrunkan niatnya untuk mengelolanya.

Implementasi kebijakan pemerintah akan membangun tiga aspek pendidikan bagi peserta didik, yakni; 1) aspek kognitif, yakni dengan mendapatkan ilmu dari tenaga pengajar, maka pengetahuan dan kecerdasan peserta didik semakin bertambah. Hal ini menjadi indikator bahwa pendidikan akan menambah ilmu dan kecerdasan dan dengan kecerdasan ini akan dapat mempelajari isi atau kandungan Al-Qur'an dengan baik; 2) aspek apektif, yakni bukan sekedar membangun aspek intelektual peserta didik tetapi juga sikap dan kepribadian peserta didik akan terbangun, seperti adanya tatakrama ketika bertemu dengan para tenaga pendidik yang mengajarkan ilmu kepada mereka; dan 3) aspek psikomotorik, yakni dengan pendidikan Al-Qur'an yang ada memberikan peluang berlatih membaca dengan fasih terutama latihan menyebut huruf-huruf Hijaiyyah sehingga dengan seringnya latihan tersebut akhirnya peserta didik mampu membacanya dengan baik dan benar. Kepiawaian anak dalam membacanya adalah sesuatu yang diharapkan masyarakat Islam pada umumnya sehingga kepiawaian tersebut berguna bagi anak itu sendiri terutama dalam menuntut ilmu agama Islam. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (Thamrin, 2023).

Peran lembaga penelitian dalam bidang keagamaan Islam diharapkan mampu membangun suasana yang dapat memotivasi masyarakat yang beragama Islam untuk bersama

memotivasi anak kita untuk berminat mempelajarinya. Guru di seyogyanya mampu memberikan nasehat-nasehat untuk dapat rajin belajar dan menyampaikannya bahwa mata pelajaran agama yang dipelajari di sekolah sangat berkaitan dengan pendidikannya di luar sekolah. Begitupun para da'i seyogyanya memberikan motivasi kepada warga masyarakat muslim agar mencintai Al-Qur'an dengan cara mempelajarinya. Lembaga pendidikan keagamaan Islam diharapkan mampu melakukan pengamatan yang menghasilkan pengetahuan yang inovatif, serta memiliki sehingga dapat diwujudkan menjadi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dengan baik.

Kurangnya integrasi mata pelajaran pendidikan agama, salahsatu penyebab peserta didik kurang berminat belajar pada lembaga ini karena tidak memiliki integrasi penilaian dengan pihak sekolah. Semisal sekolah bekerja sama dengan pengelola taman pendidikan ini, bahwa santri yang belajar di luar sekolah memiliki nilai dan menjadi nilai ekstrakurikuler di sekolah. Apabila hal ini dilakukan maka akan mempengaruhi minat belajar peserta didik. Oleh karena kebersamaan sangat diperlukan untuk mengintegrasikan hal ini agar pendidikan dapat diraih sesuai harapan bersama yakni pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh pendidikan serta masyarakat pada umumnya. Hal ini dilakukan karena dengan membangun kemitraan dengan para tokoh agama Islam agar menguatkan penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaannya.

Tujuan yang akan dicapai adalah untuk mewujudkan generasi Islam yang memiliki kompetensi dalam bidang agama Islam. Salahsatu tujuan tersebut adalah mewujudkan generasi yang qur'ani dalam kehidupan beragama. Sebagai seorang penganut agama Islam maka seyogyanya umat Islam khususnya terutama generasi Islam untuk memahami dan memiliki kompetensi dalam membaca Al-Qur'an. Apabila kompetensi tersebut tidak dimiliki oleh generasi Islam maka sudah tentu tujuan untuk mendapatkan kompetensi membaca AlQur'an tidak akan terwujud. Hal ini menjadi suatu pengetahuan Pengetahuan dikonstruksi sendiri oleh pembelajar dengan artian bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer dari satu sumber kesumber yang lain (Nurfatihmah, 2019).

Setiap potensi peserta didik perlu dikembangkan untuk terwujudnya suasana keislaman dalam masyarakat menjadi lebih baik. Di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui bahwa jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam bahkan merupakan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. Dan sangat ironis apabila jumlah penduduk Islam terbesar tersebut tidak disertai dengan pengembangan pendidikan Islam yang luas. Dengan melihat fenomena saat ini maka tokoh agama, tokoh pendidikan Islam dan para da'i bersama mengembangkan sehingga setiap santri berminat untuk dapat mempelajari dan mengetahui Al-Qur'an sebagai dasar pendidikan agama. Terkhusus kepada para tokoh agama Islam, para guru dan para da'i sangat diharapkan kebersamaannya agar program poengembangannya dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakatnya. Serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Parepare terkait dengan pendidikan tersebut diimplementasikan oleh warganya dengan mendapatkan hasil yang baik pula.

Kesempatan yang baik kepada masyarakat menuntut ilmu pengetahuan, belajar menjadi orang cerdas dan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Giat belajar akan membuat manusia lebih berkualitas dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat. Manusia yang terbaik adalah manakala manusia tersebut banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Namun bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain apabila orang tersebut tidak pernah mengenyam pendidikan. Hal inilah salahsatu penyebab pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakatnya agar lebih berminat dan termotivasi untuk belajar serta memiliki

kompetensi dalam hidupnya. Hal ini menjadi kebaikan bagi mereka yang belajar untuk mewujudkan kompetensi bagi dirinya.

Faktor kekuasaan mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah, yakni; 1) penguasa memiliki hak membuat kebijakan; yakni sebagaimana diketahui bahwa seluruh kebijakan pemerintah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah termasuk DPR dan DPRD. Merekalah yang membuat aturan yang akan diimplementasikan; 2) penguasa memiliki SDM yang cukup, yakni pemerintah memiliki banyak tenaga kerja atau pegawai yang handal dan memiliki kompetensi di bidangnya sehingga suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan tuntas termasuk bidang keagamaan Islam; 3) penguasa berkuasa menerapkan kebijakan, yakni kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, pemerintah berhak dan berwenang menerapkannya dalam masyarakat; 4) penguasa memiliki dana yang cukup, yakni pemerintah memiliki dana yang cukup sehingga implementasi kebijakan pemerintah dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya sesuai perencanaan semula; dan 5) penguasa memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat, yakni kebijakan pemerintah yang akan diimplementasikan dalam masyarakat diterima baik oleh masyarakat. Sama halnya kebijakan pendidikan akan diterima baik oleh masyarakat Islam.

METODOLOGI

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif agar dapat menguraikan secara kualitatif. Sehingga menghasilkan penelitian yang bermutu. Dan yang dimaksud penelitian bermutu tersebut adalah adanya kesesuaian data dan informasi yang tertera dalam suatu penelitian lapangan. Hal utama yang lebih menekankan adalah subyek sebagai suatu instrumen. Hasil pengolahan data dilakukan dengan fokus pada bidang pendidikan keagamaan Islam, mengumpulkan data dari berbagai lembaga pendidikan keagamaan dan instansi terkait di wilayah tersebut, termasuk pendidikan di luar sekolah. Alasan pemilihan Kecamatan Soreang sebagai objek penelitian adalah: 1) belum ada penelitian sebelumnya yang membahas pendidikan Al-Qur'an terkait kebijakan Pemerintah; 2) masyarakat memiliki potensi akademik yang bisa ditingkatkan; 3) kecamatan ini memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, yang memberikan potensi dan daya saing yang berharga untuk masa depan terutama untuk anak dan remaja.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif melibatkan peneliti aktif berinteraksi dalam situasi sosial dan memperhatikan suatu subyek sebagai peneliti. Metode untuk mengamati dan memahami fenomena secara mendalam dan terkhusus. Interaksi dengan pimpinan dengan pihak-pihak terkait. Observasi dilakukan secara berulang-ulang sampai data yang dibutuhkan terkumpul. Pengamatan ini sangat penting mengingat penelitian yang sesuai prosedur adalah melakukan observasi sebelum dilakukan wawancara dan dokumentasi. Manfaat utama melakukan observasi adalah mengetahui lebih dini mengetahui indikator masalah yang akan dihadapi di lapangan. Masalah tersebut berkaitan dengan fenomena dan problematikan pendidikan Al-Qur'an di suatu kota atau daerah.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Proses pengumpulan informasi melalui dialog antara peneliti dan informan dalam konteks observasi secara partisipatif. Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data yang komprehensif dengan melibatkan informan yang dianggap memiliki pengetahuan relevan.

Wawancara dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan jawaban yang mendalam dan penting, membangun hubungan intens antara peneliti dan informan, serta menggali informasi yang krusial. Wawancara yang dilakukan pertanyaan kepada informan sekitar pelaksanaannya terutama lafaz dan tajwid ketika membacanya. Hasil wawancara dari informan sangat dibutuhkan dan menjadi rujukan utama dalam penulisan artikel. Untuk itu wawancara secara mendalam hendaknya dilakukan metode yang tepat dan pendekatan terhadap informan lebih dekat bila dibandingkan dengan metode pendekatan lainnya. Salahsatu contoh yang perlu dilakukan wawancara adalah kejenuhan belajar santri.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan data peristiwa yang lalu dalam bentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang digunakan meliputi sejarah kehidupan, cerita, peraturan, kebijakan, foto dan ilustrasi. Hal ini berfungsi sebagai penunjang penelitian kualitatif. Studi dokumentasi sebagai pelengkap untuk dapat menyusun hasil penelitian di lapangan sehingga adanya dokumentasi ini menguatkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti. Dokumentasi merupakan bukti yang valid untuk membenarkan kegiatan penelitian.

Untuk pekerjaan proyek yang besar ketergantungan antara pekerjaan satu dengan yang lainnya sangatlah dominan dan kompleks sehingga proses pengendaliannya menjadi sangat rumit dan perlu penanganan yang optimal baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan sangatlah jarang ditemukan proyek yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan, umumnya terdapat penyimpangan, hal ini akan berdampak kepada penggunaan biaya dan waktu penyelesaian akhir proyek. Untuk itu diperlukan suatu metode pengendalian yang baik dan benar agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana. Metode pengendalian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua metode pengendalian, yaitu metode manajemen biaya Konvensional dan metode nilai hasil (*Earned Value Methode*) dengan studi kasus pada "Proyek Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Saluran Utama ROW 46 Segmen di Kawasan Jakarta Garden City, Cilincing Jakarta Utara dengan waktu pelaksanaan selama empat bulan mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ke empat.

PEMBAHASAN

Rencana Kerja Penelitian

Rencana kerja penelitian melibatkan beberapa unsur penting, yakni:

1. Penyusunan Program Kerja

Penyusunan program kerja merupakan bagian dari rencana kerja. Sebelum pekerjaan dimulai maka terlebih dahulu ada program kerja yang tersusun dengan baik. Pelaksanaan kerja tidak akan diperoleh dengan baik apabila tanpa adanya program kerja. Terkait pelaksanaannya, maka penyusunan program kerja meliputi: 1) penyusunan program kerja terkait lokasi pendidikan Al-Qur'an; 2) penyusunan program kerja terkait pemanfaatan sumber daya manusia; 3) penyusunan program kerja terkait lembaga pendidikan yang melaksanakan; 4) penyusunan program kerja terkait sumber dan penggunaan dana; dan 5) penyusunan program kerja terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Program kerja ini akan disusun dengan seksama agar dapat memberikan implementasi sesuai yang diharapkan dan dapat memberikan suatu kontribusi bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Untuk penyusunan program kerja diperlukan pengetahuan terutama aspek sosial dan humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan di tunjukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori

belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian psikologi belajar (Aulia, 2023).

2. Pemantapan Rencana Kerja

Pemantapan rencana kerja tetap dilakukan untuk mengevaluasi penyusunan program kerja yang telah tersusun. Di sini eksistensinya adalah menguji kebenaran dan ketepatan penyusunan program kerja apakah layak dipertahankan atau tidak. Apabila ditemukan penyusunan program kerja yang tidak sesuai kondisi lapangan maka jenis penyusunan program kerja tersebut akan diganti dengan penyusunan program kerja yang sesuai. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan masyarakat. Bila ditinjau dengan kondisi tersebut maka pemantapan rencana kerja diperlukan mengingat kota ini adalah kota transit. Berbagai suku dan etnis berdatangan di kota ini. Dengan demikian pemantapan rencana kerja mutlak diperlukan untuk mewujudkan mutu. Problematika Pendidikan islam yaitu suatu problem atau masalah yang ada di dalam ilmu Pendidikan dan belum terpecahkan masalahnya. (Muh. Yusron, 2023).

3. Persiapan Pelaksanaan Kerja

Persiapan pelaksanaan kerja merupakan bagian dari rencana kerja (work plan). Maksudnya adalah sebelum melangkah ke jenjang organisasi (organization) dan pelaksanaan (actuating), maka persiapan pelaksanaan kerja wajib dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman berorganisasi, kesalahpahaman melaksanakan sesuatu pekerjaan, dan kesalahpahaman dalam pengawasan. Persiapan ini dimaksudkan agar pelaku memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai sebelum terjun ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu rencana kerja yang baik terlebih dahulu dengan persiapan pelaksanaan kerja sehingga hasil pekerjaan sesuai standar kerja dan harapan pengelola suatu lembaga pendidikan. Persiapan pelaksanaan kerja akan terwujud dengan baik apabila memiliki link dengan perencanaan sebelumnya. Maksudnya adalah adanya kesesuaian antara rencana kerja dengan persiapan kerja yang akan dilakukan. Persiapan kerja yang matang akan menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas pula. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental alam bentuk komitmen anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan profesionalnya (Monica, 2021).

Organisasi Kerja (*Work Organization*)

Organisasian adalah proses yang melibatkan beberapa langkah, termasuk perincian tugas, pembagian pekerjaan, penyatuan tugas-tugas, koordinasi, serta pemantauan dan reorganisasi. Peneliti menganggap suatu organisasi kerja (work organization) sangat diperlukan, sebagai berikut:

1. Pendirian Lembaga Pendidikan

Setelah pengenalan organisasi dilakukan dan dianggap bahwa masyarakat muslim memerlukan lembaga pendidikan keislaman tersebut, maka tahap berikutnya adalah mendirikan lembaga pendidikan keislaman di luar sekolah agar keinginan dan kebutuhan warga masyarakat dapat terpenuhi dengan baik agar anak-anak mereka dapat menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan luar sekolah tersebut. Pendirian lembaga pendidikan keislaman ini harus terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi agar tidak terjadi benturan atau penolakan. Jika terjadi benturan atau penolakan dari masyarakat sekitar, pendirian lembaga pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan. Dan bila hal ini dipaksakan maka lembaga pendidikan keislaman tersebut tidak mendapatkan simpati dan empati masyarakat sekitar. Pendirian lembaga pendidikan keagamaan Islam akan mewujudkan peningkatan kualitas

pendidikan Islam. Hal ini sebagai tujuan utama pendirian lembaga pendidikan. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan Islami, adalah pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya: al-Qur'an dan Hadis (Usiono, 2020),

2. Pengurus organisasi

Pengurus organisasi harus terbentuk agar organisasi ini ada yang mengurus. Banyak lembaga saat tidak bertahan lama karena tanpa memiliki pengurus yang memiliki keinginan yang kuat dan kompetensi yang cukup. Oleh karena itu pengurus yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki komitmen memajukan suatu organisasi seperti TPA. Dan yang utama diperhatikan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai agar apa yang diurusnya dapat berjalan secara normal. Kemudian setelah pengurus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai maka selanjutnya adalah menentukan nama-nama pengurus yang menjadi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan peran lainnya sehingga terbentuklah pengurus organisasi. Peran guru atau pembina dalam suatu organisasi diperlukan terutama relevansinya dengan kurikulum. Keterlibatan guru dalam proses pengembangan kurikulum penting dilakukan untuk menyelaraskan isi kurikulum dengan kebutuhan siswa di kelas (Agustinus, 2021).

3. Memberdayakan Organisasi

Suatu organisasi yang telah terbentuk harus diberdayakan agar memiliki hasil dan daya guna dalam masyarakat. Organisasi yang telah terbentuk seperti Lembaga pendidikan di luar sekolah ini agar memiliki peran yang besar terhadap masyarakat muslim. Peserta didiknya dapat menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan ini. Organisasi wajib memberikan kontribusinya sehingga peran dan manfaat lembaga tersebut berdaya guna dalam kehidupan beragama. Suatu organisasi yang tidak diberdayakan menimbulkan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ketidakpercayaan tersebut akan berimplikasi pada pengembangan pendidikan dan dakwah Islam. Oleh karena itu untuk terlaksananya dengan baik diperlukan motivasi. Kreativitas peserta didik, keberanian menghadapi resiko, kemandirian, dan ketahanan melalui berbagai ujian hidup menjadi rendah. Anak mudah frustrasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang sampai titik darah penghabisan (Laela, 2023).

4. Menjaga dan Mempertahankan Organisasi

Organisasi yang sudah berjalan dengan baik harus dijaga dan dipertahankan agar imeg dan peran terhadap masyarakat Islam juga terjaga. Lembaga pendidikan Islam di luar sekolah yang dijaga dan dipertahankan akan mendapat simpati dan empati masyarakat terutama warga masyarakat yang memasukkan anaknya belajar pada lembaga tersebut. Adapun salah satu cara menjaganya adalah setiap pengurus memiliki komitmen untuk tetap bekerja pada lembaga pendidikan tersebut meskipun secara finansial tidak memadai, tidak sesuai harapannya akan tetapi di sisi lain ia harus berkomitmen bahwa apa yang dilakukan merupakan amal ibadah. Keikhlasan turut menentukan. Artinya setiap pengurus lembaga pendidikan Islam di luar sekolah harus menanamkan keikhlasan dalam hatinya. Hadirnya Pendidikan Agama Islam menekankan pada sebuah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya (Chaterien, 2019).

Implementasi (*Implementation*)

Dalam implementasi tersebut maka harus diperhatikan tujuannya berikut ini:

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan

Implementasi pendidikan Al-Qur'an tersebut bertujuan untuk mewujudkan kompetensi iman dan takwa peserta didik. Seluruh pengurus berkomitmen dalam pelaksanaannya agar mengutamakan tujuan yang akan dicapai. Apabila ada penyelenggara atau pengurusnya kemudian tujuan utamanya adalah memajukan pendidikan untuk memperoleh finansial yang besar dan menguntungkan, maka komitmen ini keliru dan perlu diluruskan. Setiap penyelenggara atau pengurus tidak semata-mata memikirkan keuntungan materi tetapi yang terpenting adalah bagaimana pengelolaannya dapat memberikan manfaat sehingga insan yang didambakan orang tua kita dan masyarakat dapat terwujud. Sebuah contoh, Santri A sebelum mengikuti pendidikan sama sekali tidak dapat membaca huruf Hijaiyyah sehingga kesulitan membacanya. Dengan sinerginya semua aspek/komponen pendidikan maka teknologi pendidikan mampu memerankan dirinya sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. (Abdul Mun'im, 2021).

2. Meningkatkan Akhlak Mulia

Implementasi kebijakan pemerintah tentang pendidikan selain meningkatkan iman dan takwa kepada Allah juga bertujuan untuk meningkatkan akhlak muda. Peserta didik seyogyanya mendapatkan bimbingan dan pembinaan akhlak mulia. Dan bukan sekedar mengajarjarkan dan juga diajarkan akhlak mulia, bagaimana bertatakrama yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Pembinaan tersebut bagi peserta didik adalah sesuatu yang mutlak dilakukan agar perilaku dan sikapnya bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan terhadap orang lain dan dapat berinteraksi dengan baik sehingga memperoleh suatu martabat. Martabat manusia berarti manusia itu dianugrahi banyak kemampuan, yang paling tinggi dan paling penting adalah akal dan kehendak bebas (Muhammad Ali, 2016). Manusia adalah makhluk berfikir yang selalu ingin tahu tentang sesuatu, rasa ingin tahu mendorong manusia mengemukakan pertanyaan (Eko Budi, 2022).

3. Meningkatkan Kecerdasan

Selain tujuan iman dan takwa kepada Allah, berakhlak mulia juga dalam implementasinya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan peserta didik, dalam hal ini aspek kognitifnya menjadi perhatian. Aspek kecerdasan intelektual ini sangat berguna ketika peserta didik mempelajari suatu ilmu agama ketika mempelajari dengan baik, maka aspek kognitifnya diperlukan dalam pencapaian kualitas belajar. Dalam pembinaan lembaga pendidikan tujuan aspek kognitif tersebut dibangun adalah dasar-dasar ajaran Islam kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Meningkatkan kecerdasan sangatlah penting karena aspek kognitif merupakan sesuatu yang urgen untuk mewujudkan kualitas belajar para santri. Aspek kognitif adalah aspek di mana mengedapkan cara berpikir yang rasional dan kritis untuk memahami dan bahkan mendalami sesuatu pengetahuan. Hal ini ada relevansinya dengan profesional guru atau pembina. Seorang dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, dan sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap continuous improvement (Abdul Rahman, 2019).

Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan memiliki tujuan, yaitu: 1) tercapainya kesempurnaan insan yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Swt; dan 2) kesempurnaan insan yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. (M. Yusuf, 2016)

4. Menghargai Sesama Manusia dan Toleransi

Setiap lembaga selain membina dan mentransformasikan ilmu agama dan juga diajarkan bagaimana menghargai sesama manusia meskipun berbeda agama, suku dan ras. Bahkan persoalan toleransi diajarkan secara dini sehingga apabila sudah berada pada usia remaja dan dewasa, peserta didik tidak mengalami kesulitan untuk memahami persoalan toleransi dan moderasi beragama. Hal ini perlu dibekali kepada peserta didik agar sanggup bergaul dan berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia bahkan terhadap lingkungannya.

Pengawasan (*Controlling*)

Implementasi pendidikan Al-Qur'an memerlukan pengawasan dan evaluasi agar aktivitas pendidikan ini berjalan secara komprehensif dan berkesinambungan. Pengawasan dan evaluasi dimaksud, meliputi:

1. Pengawasan Terhadap Sumber Daya Manusia

Pengawasan terhadap SDM dalam lembaga pendidikan keagamaan baik pendidikan nonformal diperlukan pengawasan untuk menjaga stabilitas lembaga. Apabila pengawasan ditiadakan maka orang yang beraktivitas dalam suatu lembaga berpotensi untuk tidak disiplin, korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Untuk tidak terjadi hal seperti itu maka diperlukan pengawasan melekat. Dalam hal ini pengawasan terhadap SDM berguna untuk dapat mencegah hal kebangkrutan. Dengan adanya pengawasan SDM yang dilakukan secara kontinyu akan terwujud implementasi yang sesuai dan berkualitas. Tenaga pendidik yang diawasi tersebut tentunya menjaga dirinya dari kekeliruan dalam mengajarkan kepada peserta didiknya.

2. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi diperlukan untuk melihat hasil kinerja oleh para pengurus dan pembina pendidikan Al-Qur'an. Evaluasi untuk mengetahui dan menilai program kerja berjalan atau tidak berjalan. Evaluasi tersebut meliputi: 1) evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya manusia terutama tanggungjawab dan kedisiplinannya; 2) evaluasi terhadap eksistensi organisasi, apakah keberadaan organisasi dapat dipertahankan atau tidak; 3) evaluasi terhadap penggunaan dana, apakah penggunaan dana tepat sasaran atau tidak, apakah tidak ada terjadi korupsi di dalamnya; dan 4) evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat, apakah warga masyarakat yang anaknya dibimbing merasa senang dan puas atau tidak. Untuk mengetahui hal yang disebutkan di atas, maka pengurus organisasi melakukan evaluasi secara intensif dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Rencana kerja (*work plan*) melibatkan beberapa unsur penting, yakni: analisa kebijakan pemerintah, yakni kebijakan pemerintah terlebih dahulu diamati, tinjauan lembaga pendidikan Al-Qur'an wajib dilakukan sebelum kebijakan pemerintah dilakukan, penyusunan program kerja merupakan bagian dari rencana kerja, pemantapan rencana kerja dilakukan untuk mengevaluasi penyusunan program kerja yang telah tersusun, dan persiapan pelaksanaan kerja untuk memantapkan pekerjaan untuk tahap berikutnya.

Organisasi kerja (*work organization*), adalah proses yang melibatkan beberapa langkah. Peneliti menganggap suatu organisasi kerja diperlukan, sebagai berikut: pengenalan organisasi wajib dilakukan agar pengelola dan warga masyarakat mengetahui peran lembaga pendidikan; pendirian lembaga pendidikan, setelah pengenalan organisasi dilakukan, pengurus organisasi seperti lembaga pendidikan Islam di luar sekolah terbentuk agar organisasi ini ada yang mengurus, memberdayakan organisasi yang telah terbentuk agar memiliki hasil dan daya guna dalam masyarakat, serta menjaga dan mempertahankan organisasi yang sudah berjalan dengan baik.

Implementasi (*Implementation*), yakni dalam melaksanakan pendidikan keagamaan, Dalam implementasi ini selain mewujudkan kompetensi santri membaca Al-Qur'an juga meningkat kecerdasan peserta didik, dan menghargai sesama manusia dan toleransi. Dengan demikian implementasi pendidikan keagamaan Islam tersebut memberikan kontribusi dalam peningkatan pendidikan Islam yang diselenggarakan di luar sekolah. Implementasi pendidikan keagamaan Islam ini akan memperkuat pengetahuan agama di sekolah.

Pengawasan (*controlling*), implementasi pendidikan Al-Qur'an memerlukan pengawasan agar aktivitas pendidikan ini berjalan secara komprehensif dan berkesinambungan. Pengawasan yang dimaksud, meliputi: pengawasan terhadap sumber daya manusia, pengawasan terhadap aspek organisasi; pengawasan terhadap aspek pembinaan, dan evaluasi. Apabila pengawasan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya akan berdampak pada kesinambungan pengelolaan pendidikan keagamaan Islam nonformal tersebut yang diharapkan oleh masyarakat yang beragama Islam terkhusus kepada mereka yang memiliki anak dan belajar pada lembaga pendidikan nonformal tersebut.

Hasil penelitian, yakni: meningkatnya minat-baca, yakni sebelum peserta didik mengikuti pada lembaga pendidikan ini banyak peserta didik yang kurang menguasai membaca dan menulis huruf Hijaiyyah termasuk membacanya. Namun setelah mengikuti pendidikan pada TPA maka kemampuan menulis huruf Hijaiyyah meningkat serta mampu membaca Al-Qur'an., Peserta didik diajarkan tentang Rukun Iman sehingga diupayakan untuk meyakini sepenuh hati tentang iman kepada Allah, malaikatNya, KitabNya, RasulNya, hari pembalasan, qadha dan qadar serta meningkatnya tatakrama yang baik peserta didik, misalnya sikap dan perilakunya lebih baik serta santun dalam berucap.

REFERENSI

- Abdul Mun'im Amaly (2021) Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengoptimalkan Pembelajaran Berbasis Teknologi. *Jurnal: Al-Thariqa*, 6(1), 6712.
- Abdul Rahman Getteng. 2019. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinus (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Tanggung Daga: Jurnal Education*, 7(3), 10751090.
- Aulia Rahman, dkk. (2023). Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya dalam Pembelajaran. *Author: Education and Learning Journal*, 2(3), 402–409.
- Catherien Suci (2019) Rekonstruksi PAI Bertema Ibadah: Wudhu' serta Implementasinya pada Aspek Penilaian Sikapa. *Jurnal: Dibuna*, 8(2), 2622-7215.
- Eko Budi Praseyo (2022). Asumsi Dasar pada Ilmu Pengetahuan Menjadi Basis Penelitian Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 380-386
- Laela Hamidah Harahap (2023). Journal of Islamic Education El Madani. Problematika Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam di Madrasah. e-ISSN 28277767, 2(2), 94–99.
- Maulana Akbar Sanjani (2020). Tugas dan Peranan Guru dalam Proses Peningkatan Belajar Mengajar. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*. 6(1), 35–42.
- M. Yusuf Ahmad dan Siti Nurjannah (2016). Hubungan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Kecerdasan Emosional Siswa. *Jurnal Al-hikmah*, 13(1), 1–17.
- Muhammad Ali Shomali. *Seri Referensi Islam: Etika*. Cet. I; Jakarta: Citra, 2016,
- Muhammad Yusron, Maulana El-Yunusi (2022). Ilmu Pendidikan Islam Sebagai Bentuk Kajian Masyarakat Milenial. *Studi Religia: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 7(2), 202–219.
- Monica Febriana Suwandi (2021). Strategi Peningkatan Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia*, 18(1), 76–94
- Nurfatimah Sugrah Humanika (2019). Implementasi Belajar Teori Kontruksivisme dalam Pembelajaran Sains, *Jurnal Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, FKIP Universitas Khairun* 19(2).121-138.

- Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, 2015.
- Usiono (2020). Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer (Sebuah Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*. 1(2),13337
- Thamrin Efendy (2023). Konsep Sistem Among Dalam Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara, *JMI: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, , 2(6), 203–220.
- Usiono (2020). Rekonstruksi Pendidikan Islam Kontemporer (Sebuah Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam). *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*. 1(2),13337
- Pebria Dheni Purnasari, dan Yosua Damas Sadewo (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kompetesnsi Pedagogik. *Publican Journals UNM: Jurnal Publikasi Pendidikan* , 10(2), 189–196.